

Seladang meski tak Serumpun Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Perspektif Geostrategis

Dion Maulana Prasetya¹

Abstrak

Indonesia dan Malaysia sering dianggap sebagai negara serumpun. Pandangan tersebut berpengaruh terhadap hubungan antara dua negara yang banyak dibentuk oleh diskursus-diskursus identitas. Seringkali dalam proses pengambilan kebijakan, para elit politik dipengaruhi oleh “ikatan kekerabatan” antara kedua negara. Namun sejarah membuktikan bahwa pertimbangan geostrategis sangat memengaruhi hubungan Indonesia-Malaysia di masa lampau. Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan kedua negara di masa lampau jika dipandang dari sudut pandang geostrategis, serta bagaimana prospek hubungan Indonesia-Malaysia di era Poros Maritim. Argumentasi utama tulisan ini adalah hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya digerakkan oleh faktor-faktor identitas, tetapi juga oleh faktor geostrategis. Jika selama ini hubungan keduanya seringkali diterjemahkan sebagai hasil dari politisasi kebudayaan, tulisan ini lebih menekankan pada faktor-faktor strategis di mana Selat Malaka menjadi salah satu *center of gravity*-nya. Tulisan ini akan dibagi menjadi empat bagian. Pertama akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektif identitas. Bagian kedua membahas sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dari perspektif historis dengan menitik beratkan pada aspek geostrategisnya. Sedangkan bagian ketiga akan membahas hubungan Indonesia-Malaysia kontemporer dengan penekanan pada visi Indonesia sebagai poros maritim. Bagian keempat adalah kesimpulan.

Kata-kata kunci: Serumpun, Identitas, Geostrategi, Poros Maritim.

Abstract

Indonesia and Malaysia are often considered as kins. The perspective has been influencing the relationship between the two which has been shaped by identity discourse. In the decision making process, political elite are often influenced by the ‘kinship bound’ between two countries. History, however, proved that geostrategic considerations determined the relationship of the two significantly in the past. This article aims to discuss the Indonesia-Malaysia relationship in the past from geostrategic perspective, and to discuss how are the prospects of the relationship in the Maritime Axis era. This article argues, the relationship between Indonesia and Malaysia is not only determined by identity factors, but also geostrategic ones. Most scholars think that the relationship of the two are the result of culture politicization, but the author sees that geostrategic factors, which is Malaka as one of the center of gravity, are very determinant. This article is divided into four section. The first section will discuss the Indonesia-Malaysia relationship from the identity perspective. The second one talks about the history of the two with an emphasis on geostrategic aspects. The third section discusses contemporary Indonesia-Malaysia relationship with an emphasis on Indonesia vision as maritime axis. The last part is the conclusion of the article.

Keywords: *Serumpun*, Identity, Geostrategic, Maritime Axis.

¹ Penulis adalah mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Email: dionprasetya@gmail.com

Pendahuluan

Hubungan dua negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, kerap kali mengalami pasang-surut. Pasang-surut hubungan keduanya sangat dipengaruhi oleh konstruksi identitas sebagai negara “serumpun” yang memiliki kesamaan kultural – khususnya bahasa. Konstruksi identitas ini memunculkan fenomena unik, di mana Indonesia kerap memosisikan diri sebagai “abang atau saudara tua” dari Malaysia yang dianggap sebagai “saudara muda”. Tak pelak cara pandang tersebut selalu mewarnai hubungan Indonesia-Malaysia, khususnya ketika keduanya sedang dilanda permasalahan. Seringkali “saudara tua” merasa dilecehkan atau direndahkan oleh “saudara mudanya” ketika kesalahpahaman terjadi. Misalnya dalam kasus sengketa perbatasan di perairan Ambalat dan permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja Indonesia, ketua DPR RI saat itu (tahun 2009), Agung Laksono, menyatakan, Malaysia telah merendahkan bangsa Indonesia serta tidak mencerminkan sikap sebagai negara serumpun (Diputra, 2009). Opini bernada serupa juga dilontarkan oleh Mahfud M.D, yang kala itu (tahun 2007) menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI. Dalam menanggapi kasus pemukulan Polisi Malaysia terhadap Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia, Donald Luther Colopita, Mahfud juga mengatakan bahwa Malaysia telah melecehkan dan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia sebagai “saudara tua” (Mahfud MD, 2007). Hal serupa juga terjadi di pihak Malaysia, meski dengan skala yang lebih rendah (Hidayat & Widjanarko, 2008)².

Konstruksi identitas sebagai negara “serumpun”, baik di Malaysia maupun di Indonesia, tidak terlepas dari politisasi kebudayaan (*politization of culture*) yang pernah dilakukan oleh para bapak bangsa kedua negara. Dalam hal ini, Susan Wright mengatakan, kebudayaan suatu bangsa merupakan proses kontestasi dari upaya pembentukan sebuah makna (*a contested process of a meaning-making*) (Wright, 1998: 7-15). Upaya pembentukan makna ini pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob dan Burhanuddin Al-Helmy dari Semenanjung, serta Sukarno dan Muhammad Yamin dari Indonesia, melalui gagasan penyatuan Semenanjung dan Kepulauan (Indonesia) menjadi satu kesatuan politik dan budaya bernama Indonesia Raya atau Melayu Raya (McIntyre, 1973). Identitas “Indonesia Raya atau Melayu Raya” yang bersumber dari kesamaan kebudayaan inilah yang di kemudian hari, barangkali sampai saat ini, mewarnai

² Penyebab utamanya adalah kembalinya Inggris ke Semenanjung setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu, sehingga gagasan mengenai persatuan Nusantara yang didukung oleh Jepang juga turut layu sebelum berkembang. Sedikit uraian mengenai hal ini baca tulisan Daniel Dhakidae, “Meninggalkan Indonesia-Raya dan Menemukan Kembali Indonesia Dalam,” dalam, Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko, 2008, *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Penerbit Mizan.

hubungan Indonesia-Malaysia. Pada titik ini, munculnya identitas sebagai “saudara” – karena proses politisasi kebudayaan – yang bertemu dengan kelahiran negara-bangsa pasca Perang Dunia II di Asia Tenggara, menciptakan kesadaran unik sebagai satu keluarga meski berbeda kebangsaan (*one kin, two nations*) (Yong Liow, 2005). Inilah yang menjadi titik penting rumitnya memahami hubungan Indonesia-Malaysia.

Identitas yang Cair

Meski telah mengalami pemudaran makna mengenai keserumpunan, bahkan semenjak kedua negara lahir menjadi Indonesia dan Malaysia, wacana tersebut masih sangat kuat terpatri di dalam benak masyarakat kedua negara. Setidaknya media massa di kedua negara sangat berperan dalam “mengawetkan” wacana keserumpunan tersebut (Clark, 2014). Pada tataran diplomatik-normatif, hal ini nampaknya tidak menjadi masalah yang berarti. Namun pada tataran yang lebih strategis, dominasi wacana keserumpunan hanya akan mengaburkan, bahkan melemahkan, kepentingan nasional kedua negara. Sentimen identitas sebagai negara serumpun hanya akan mengikis rasionalitas para pembuat kebijakan, sehingga rentan memunculkan mispersepsi – faktor utama yang memantik Perang Dunia I dan II (Jervis, 1988). Oleh sebab itu dibutuhkan upaya menumbuhkan kesadaran baru yang sifatnya lebih strategis dan relatif tetap (tidak berubah). Apa yang dimaksud “tetap” di sini adalah faktor geografis. Untuk membahas hal ini, penulis akan menggunakan pemikiran sejarawan Perancis, Fernand Braudel.

Braudel menjadi salah satu pelopor studi sejarah total yang tidak hanya berkisah tentang sejarah peristiwa, tetapi juga bagaimana alam atau lingkungan sekitar memengaruhi kehidupan sosial-politik penduduknya. Dengan kata lain, Fernand Braudel berpaling pada struktur daripada peristiwa. Braudel memandang geografi sebagai aspek sejarah yang paling imun terhadap perubahan. *Geographical time*, menurutnya, mengalami perubahan yang sangat lambat, meski tetap mengalami perubahan. Sebagai analogi, bayangkan pegunungan, sungai-sungai, atau selat-selat, yang tentunya mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan tersebut begitu lambatnya sehingga tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, dalam artian pengalaman pribadi, kecuali menggunakan bantuan ilmu pengetahuan atau perbandingan melintasi ruang dan waktu yang sangat panjang. Pada level kedua terdapat struktur ekonomi dan kebudayaan yang berdurasi menengah. Meski begitu dibutuhkan waktu setidaknya dua sampai tiga abad untuk dapat melihat perubahan pola (*pattern*) pada level ini. Sebagai contoh, kehidupan suatu negara atau peradaban,

kondisi psikologis atau spiritualnya, berhasil diturunkan dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan radikal. Sedangkan pada level terakhir berkaitan dengan peristiwa yang berubah sangat cepat. Pada level inilah sejarah politik dan tokoh-tokoh ditulis (Braudel, 1994).

Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, wacana keserumpunan, selain bersumber pada fakta historis terjadinya perkawinan campuran di antara penduduk Nusantara, merupakan produk dari sebuah *meaning-making* yang diusahakan oleh Sukarno-Yamin dan Yaakob-Al Helmy. Dengan kata lain, menggunakan pemikiran Braudel, wacana keserumpunan yang mewujud sebagai identitas Indonesia dan Malaysia masuk di dalam struktur sosial-kebudayaan yang kecepatan perubahannya lambat-menengah. Sehingga, cepat atau lambat, struktur sosial-kebudayaan tersebut akan berubah dan kehilangan maknanya jika tidak ada proses pemaknaan ulang di kedua negara. Namun, agaknya usaha pemaknaan ulang akan menghadapi permasalahan pelik, mengingat struktur masyarakat internasional sudah berubah secara fundamental. Munculnya negara-bangsa menjadi penanda identitas baru sehingga mengikis “persaudaraan” Nusantara, digantikan oleh nasionalisme Melayu (Malaysia) di semenanjung dan Indonesia yang kepulauan.

Salah satu wacana tandingan yang muncul dengan “mengendarai” globalisasi dan diyakini mampu mengikis nasionalisme kaku ala negara-bangsa adalah kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme merupakan sebuah paham bahwa setiap orang diberkahi dengan satu tatanan etika-politik yang terkonstruksi secara global (Gannaway, 2009)³. Namun, meski mampu mengikis nasionalisme di satu sisi, kosmopolitanisme juga akan menghilangkan identitas “lokal” sebagai bangsa serumpun Indonesia-Malaysia pada sisi yang lain. Alih-alih semakin menguat, ke depannya wacana keserumpunan akan semakin tenggelam ditelan arus globalisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis bermaksud menawarkan perspektif geostrategis dalam memahami hubungan Indonesia-Malaysia. Untuk membuktikan relevansi faktor geografi dalam studi Indonesia-Malaysia penulis akan membahas mengenai hubungan keduanya pada abad ke-15 dan ke-16, di mana Selat Malaka menjadi *center of gravity*. Dari sejarah Nusantara abad 15-16 kita dapat menyimpulkan, Selat Malaka merupakan dan tetap

³ Para penganut kosmopolitanisme berpendapat bahwa solidaritas politik dan kultural tidak lagi dapat dibatasi oleh kedaulatan negara-bangsa karena globalisasi telah menggerogoti banyak fungsi utamanya – yang darinya negara-bangsa memperoleh legitimasi. Lihat juga Cheah Pheng, 2006, “Cosmopolitanism”, *Theory of Culture Society* (23: 486). Secara umum kosmopolitanisme memiliki definisi yang berposisi dengan definisi nasionalisme. Jika nasionalisme bersifat partikular, kosmopolitanisme bersifat universal.

menjadi faktor penting yang menggerakkan masyarakat Asia (dan juga kemudian Barat) sampai saat ini.

Malaka yang Strategis

Satu hal yang patut diperhatikan, Selat Malaka menjadi jalur penting perdagangan tidak hanya setelah munculnya Kerajaan Malaka di abad 15. Semenjak era Kerajaan Sriwijaya, selat tersebut telah menjadi jalur perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Namun begitu, kemajuan teknologi perkapalan dan navigasi membuat Malaka semakin penting di abad-abad berikutnya, terlebih di abad 15 dan 16. Pelabuhan dagang Malaka merupakan titik bertemunya barang beserta manusia-manusia dari Tiongkok, India, Arab, Jawa dan kepulauan Nusantara lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan pun sangat beragam, mulai dari rempah-rempah, tekstil, perhiasan, sampai ke benda-benda logam (Cleary & Chuan, 2000). Bisa dikatakan bahwa pelabuhan Malaka merupakan pasar pusat titik pertemuan dari perdagangan antar bangsa Asia.

Tabel 1. Komoditas yang diperdagangkan di Malaka awal abad 16

<i>To Malacca</i>	<i>Product</i>
Long distance from:	
Bengal	Textiles, metals, pottery
Gujerat	Textiles
Middle East	Textiles, drugs, metals, jewels
China	Textiles, aromatics, jewels, ceramics
Regional from:	
Sumatra	Spices, aromatics, slaves, sea products, metals
Java	Metals, spices
Borneo	Metals, spices, sea/forest products
Siam	Spices, jewels, gems
T'ai	Rice, metals
Moluccas	Spices
From Malacca to:	<i>Product</i>
Bengal	Pottery, metals, spices, jewels
Gujerat/Middle East	Ceramics, metals, spices, textiles
China	Jungle/forest products, textiles, spices, metals
Brunei	Metals, jewels, textiles
Sumatra/Java	Textiles
Moluccas	Textiles, metals

Sumber: Mark Cleary dan Goh Kim Chuan (2000)

Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah kesadaran geostrategis manusia-manusia Nusantara abad ke 15 hingga 16. Manusia Nusantara begitu paham mengenai pentingnya menjaga stabilitas Malaka demi keberlangsungan “arus” dari Utara ke Selatan dan juga sebaliknya. Sedikit saja terjadi masalah di Malaka, maka hal itu dapat merusak struktur ekonomi dan sosial-budaya yang telah lama terbangun di Nusantara. Ada baiknya membaca novel sejarah Pramoedya Ananta Toer untuk sekedar membangun gambaran tentang kesadaran geostrategis manusia-manusia Nusantara abad 15-16. Pramoedya berkali-kali menekankan pada kesadaran maritim, khususnya betapa pentingnya Malaka bagi keberlangsungan kehidupan bermartabat di Nusantara. Penguasaan Portugis atas Malaka menjadi titik balik (atau dalam bahasa Pram “arus balik”) kemunduran kerajaan-kerajaan Nusantara. Monopoli perdagangan bangsa Barat (Portugis, Inggris, dan Belanda) mematikan perdagangan kuno Asia Tenggara, sehingga merubah struktur ekonomi dan sosial-politik Nusantara secara fundamental. Oleh sebab itu menjadi isu bersama kerajaan-kerajaan Nusantara abad 15 untuk mengusir Portugis dari Malaka. Dalam salah satu percakapan di dalam Arus Balik, Pram menulis,

“...selama Peranggi (Portugis) menguasai jalan rempah-rempah, merekalah yang menguasai dunia, dan kita hanya menduduki pojokan yang gelap. Apabila mereka tak dihalau dari tempat-tempat mereka berkuasa sekarang ini (Malaka), bahkan dibiarkan semakin kuat juga, nasib Jawa dan Nusantara sudah dapat ditentukan – ambruk entah sampai berapa keturunan” (Toer, 2002: 745)⁴.

Apa yang ditulis oleh Pram di atas nampaknya bukan dongengan semata. Beberapa peristiwa berkaitan dengan penguasaan Malaka yang terjadi di abad 16 menjadi bukti bahwa kesadaran geostrategis sangatlah tinggi saat itu. Setidaknya dua usaha membebaskan Malaka dari Portugis dapat menjadi bukti apa yang ditulis oleh Pram tersebut. Pada tahun 1513 pasukan dari Kerajaan Demak di bawah komando Pati Unus berangkat dari Jepara menuju Malaka untuk membebaskan “jantung” perdagangan tersebut dari penguasaan Portugis. Menurut kesaksian dari pihak Portugis, armada Pati Unus merupakan armada paling besar yang pernah dihadapi sepanjang sejarah penaklukan di Hindia. Sebanyak seratusan kapal perang, empat puluh jung, dan enam puluh *lancara* - di mana yang terkecil berkapasitas 200 ton – berangkat untuk

⁴ Meskipun tidak bisa digunakan sebagai sumber sejarah, novel “Arus Balik” agaknya berangkat dari penelitian yang dilakukan oleh penulisnya sebelum akhirnya ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan diasingkan di pulau Buru tanpa sempat membawa satu sumber pun. Oleh sebab itu, dalam konteks penulisan karya ilmiah, novel “Arus Balik” hanya dapat digunakan sebagai gambaran masyarakat Jawa abad 15-16 dan hubungan antar masyarakat di Asia Tenggara secara umum, bukan sebagai sumber sejarah ilmiah.

membebaskan Malaka (Lombard, 2008:94). Meski mengalami kekalahan, serangan dari Jawa kembali dilancarkan dan menciptakan pertempuran sengit yang berlangsung selama tiga bulan, pada tahun 1574 atas perintah Ratu Kalinyamat dari Jepara (Ricklefs, 2001: 45). Kesultanan Malaka sendiri juga bukan kerajaan yang tidak paham geostrategi. Selain kesiapan menerima misi perdamaian dari para pendatang untuk berdagang, Kesultanan Malaka juga bersiap untuk menghalau ancaman yang sewaktu-waktu dapat muncul. Pihak Portugis mencatat, terdapat 3.000 buah meriam, 2.000 dari perunggu dan 1.000 dari besi, yang berhasil dirampas oleh Albuquerque ketika menaklukkan pelabuhan di tahun 1511 (Lombard, 2008: 208). Hal-hal tersebut hanyalah menunjukkan betapa pentingnya posisi Malaka dalam konteks geostrategi.

Upaya pembebasan Malaka lainnya yang tercatat dalam sejarah dilakukan oleh Aceh. Dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis, pusat perdagangan terpecah dan memunculkan titik-titik perdagangan baru seperti Aceh dan Pasai di Sumatra, dan Johor di semenanjung. Dengan memanfaatkan kemunduran Malaka dan peningkatan perniagaan di wilayahnya, Aceh bertransformasi menjadi ancaman yang paling berbahaya bagi Portugis. Seorang uskup Portugis bernama Jorge Temudo mengakui bahwa orang-orang Aceh adalah musuh yang paling berbahaya di Asia (Soedjono & Leirissa (ed), 2008). Kesultanan Aceh diberitakan meminta bantuan militer kepada Kekaisaran Turki berupa pengiriman meriam-meriam, pembuat-pembuat senjata api, dan penembak-penembak, yang tiba di Aceh pada tahun 1566 atau 1577. Dengan bantuan dari Turki dan Jawa, Aceh melancarkan serangan terhadap Malaka pada tahun 1568 (Soedjono & Leirissa (ed), 2008 : 359). Peperangan yang terus menerus berkecamuk di Malaka membuat kedua belah pihak yang berperang kelelahan sehingga menciptakan periode damai di penghujung abad 16. Namun, memasuki abad 17, di bawah Sultan Iskandar Muda, Aceh kembali bangkit menjadi kekuatan besar di Sumatra dan Semenanjung. Hasilnya, Aceh berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatra dan Semenanjung seperti, Deli, Aru, Johor, Pahang, Perak, dan Kedah. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut, sasaran penaklukan berikutnya bisa ditebak – Malaka – yang dilancarkan pada tahun 1629 (Lombard, 2006 : 141-145).

Sekali lagi, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran geostrategis manusia-manusia Nusantara abad 15-16. Alih-alih termotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan identitas-kultural, upaya penaklukan Malaka lebih didasarkan pada aspek strategisnya. Jika benar faktor

identitas-kultural yang dominan, maka Aceh tidak akan menyerang Johor yang sama-sama Islam.

Perihal ini Rickfles menulis:

“When the VOC arrived, Johor built up a friendly association with the Protestant Dutch, and the Portuguese attempted, albeit unsuccessfully, to forge an alliance with Aceh. Religion cannot explain the warfare in the Straits of Malacca, the true roots of which were to be found in the clash among three powerful states for commercial and imperial hegemony in the area” (Ricklefs, 2001: 38).

Poros Malaka (?)

Posisi strategis Selat Malaka bukanlah cerita manis dongeng sebelum tidur manusia-manusia Nusantara yang hanya berakhir sebagai satu bab di buku pelajaran sekolah. Dari sudut pandang geostrategis, Malaka yang dahulu tidak berbeda dengan Malaka yang sekarang. Jika dahulu Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk, begitu juga saat ini. Sebanyak puluhan ribu kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya. Salah satu komoditas paling besar dan strategis adalah minyak mentah, yang tercatat mendominasi sedikitnya 90 persen dari total komoditas yang melintasi Selat Malaka. Di tahun 2011 jumlah minyak mentah yang tercatat melintasi Selat Malaka sebesar 15,2 juta barel per hari, meningkat 1,4 juta barel dari tahun 2007 yaitu sebesar 13,8 juta barel per hari (U.S. Energy Information Administration, 2014). Padatnya arus kapal di Selat Malaka dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah kapal yang melintas setiap tahunnya. Tabel di bawah menunjukkan pertumbuhan jumlah kapal yang melintasi Selat Malaka sejak tahun 2000 sampai tahun 2006. Jumlah tersebut hampir tiga kali lebih besar dari jumlah kapal yang melintasi Terusan Panama, dan dua kali lebih besar dari jumlah kapal yang melintasi Terusan Suez.

Tabel II.4 Jumlah Kapal yang Melintasi Selat Malaka th. 2000-2006

Year	Number of vessels
2000	55,957
2001	59,314
2002	60,034
2003	62,334
2004	63,636
2005	62,621
2006	65,649

Berkaca pada keberlanjutan strategis (*strategic continuity*) Selat Malaka, sudah seharusnya pemerintah Malaysia dan Indonesia kembali pada kesadaran geostrategis yang telah dibangun oleh nenek moyang kedua bangsa selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Indonesia, melalui Presiden Joko “Jokowi” Widodo, telah mengumandangkan gagasan “Poros Maritim Dunia” sebagai visinya. Niat baik tersebut tertuang dalam buku visi-misi Jokowi-JK yang berbunyi, “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.” Selain itu, pada berbagai kesempatan Jokowi kerap mengatakan, bangsa Indonesia telah lama “memunggungi” lautan dan sekarang adalah saat yang tepat untuk kembali menjadikan lautan sebagai halaman depan Indonesia. Kesadaran geostrategis telah terlahir (kembali) di Indonesia, setidaknya pada aras wacana.

Gagasan “Poros Maritim Dunia” menjadi “angin segar” bagi sebuah bangsa yang telah dipaksa untuk melupakan jati dirinya selama ratusan tahun – baik oleh pemerintah kolonial maupun oleh pemerintah Orde Baru. Namun, terdapat setidaknya dua pelajaran penting yang terlewat oleh Jokowi dan pemerintahannya. Pertama, gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak memiliki landasan historis. Gagasan besar “Poros Maritim Dunia” tentunya tidak ditulis di dalam ruang hampa, yang kemungkinan besar mengacu pada model yang telah ada di masa lalu. Dalam konteks ini mengacu pada kejayaan imperium maritim Sriwijaya dan Majapahit. Meski tampak “historis” acuan ini justru sifatnya ahistoris, dan lebih bersifat mitos, karena fakta sejarah tidak berkata demikian. Kesalahan mendasar dari Jokowi (dan juga timnya), memandang kebesaran imperium maritim Sriwijaya dan Majapahit adalah karena dirinya sendiri (*per se*). Padahal kebesaran Sriwijaya maupun Majapahit terletak pada jaringan dagang, bukan pada kebesaran diri sendiri (Hobson, 2004)⁵. Dengan kata lain gagasan poros maritim tidak semestinya menjadi milik Indonesia semata, dan keberhasilannya juga tidak hanya ditentukan oleh kebijakan “maritim” domestik semata, tetapi jaringan atau kolektivitas.

⁵ Pandangan seperti ini persis seperti mitos yang dibuat oleh bangsa Eropa yang selalu membesar-besarkan peran para petualangnya dalam membangun jaringan dagang di seluruh dunia, termasuk di Asia Selatan. Sehingga muncul mitos jaringan dagang Asia baru tercipta setelah mendapat “sentuhan” dari bangsa Eropa. Mitos ini dipatahkan oleh John M. Hobson yang berargumen, bangsa Eropa justru memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari jaringan dagang Asia yang telah mapan jauh sebelum kedatangan mereka di abad 16. Untuk jaringan dagang, lihat juga, Kenneth R. Hall, 2011. *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. Plymouth: Rowman & Little Field Publishers.

Gagasan yang sifatnya ahistoris tersebut mengantarkan pada kesalahan kedua, yaitu teritorialisasi maritim. Term teritorialisasi maritim ini dipinjam dari Susanto (2014). Pandangan ini, melanjutkan warisan Orde Baru, hanya melihat laut sebagai batas wilayah yang harus dijaga kedaulatannya. Dengan kata lain, laut diibaratkan sebagai pagar pembatas, bukannya sebagai pintu gerbang konektivitas maritim antar bangsa. Kecenderungan ini dapat dilihat dari (ekspos) kebijakan penenggelaman kapal nelayan negara tetangga yang dianggap mencuri ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Tentunya kebijakan seperti ini tidak salah, jika dibarengi dengan upaya pembangunan budaya maritim kepada para nelayan yang hidup dan beraktivitas di perairan perbatasan. Tanpa itu, penenggelaman kapal hanya menjadi “basa-basi” belaka, tanpa kesadaran sesungguhnya mengenai potensi utuh maritim Indonesia.⁶

Berkaca pada pertimbangan tersebut maka sangatlah tepat jika prioritas utama pemerintahan Jokowi adalah memperlancar arus “kehidupan” dari barat ke timur dan sebaliknya. Jika Selat Malaka adalah “jantung”, maka Kepulauan Sunda Kecil merupakan “urat nadi” kehidupan Indonesia. Dua-duanya sangat menentukan sehat-tidaknya kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Jokowi hanya berfokus pada pembangunan maritim di bagian barat Indonesia saja dan mengesampingkan wilayah timur, maka ketimpangan sosial akan semakin lebar. Jika ketimpangan sosial semakin lebar, maka potensi perpecahan negara akibat keinginan untuk berpisah dari NKRI juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jika hanya berfokus pada “kesehatan urat nadi” tanpa memerhatikan “jantung”nya, maka Indonesia tidak akan bisa mengambil keuntungan dari perdagangan global yang sebagian besar memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur perniagaannya.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia, menjadikan Selat Malaka menjadi “jantung maritim” tidak bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri. Jantung yang dimaksud merupakan jantung bersama, antara Indonesia dan Malaysia (dan juga Singapura). Indonesia dan juga Malaysia harus segera “membangkitkan batang terendam” kesadaran geostrategis yang telah lama tenggelam, kembali membuat “jantung” Malaka berdenyut, dan kembali menghidupkan jaringan kuno yang telah dibangun oleh nenek moyang kedua bangsa. Untuk itu, langkah baiknya jika ke depannya hubungan Indonesia-Malaysia dikerangkai oleh perspektif geostrategis, daripada identitas keserumpunan.

⁶ Potensi maritim seutuhnya merujuk tidak hanya pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, tetapi juga berkaitan dengan potensi geostrategis dan geopolitiknya.

Penutup

Membangun kesadaran geostrategis bukanlah pekerjaan yang mudah. Semenjak kekalahan Demak di Malaka, dan berkuasanya kesultanan di Jawa yang berorientasi ke dalam (inward-looking), kesadaran geostrategis Nusantara juga ikut tumbang. Membangkitkan kesadaran geostrategis bisa jadi lebih sulit daripada mempertahankannya. Karena jika telah tenggelam, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk membangkitkannya kembali. Itulah mungkin mengapa Demak dan juga Aceh begitu *ngotot* untuk membebaskan Malaka, “jantung” maritim Nusantara. Bolehlah berandai-andai, ketika hendak menyerang Malaka Pati Unus mengatakan hal yang sama dengan Laksamana Laut Inggris, Andrew Cunningham, “*It takes the Navy three years to build a ship. It will take three hundred years to build a new tradition.*” Armada gabungan Demak-Aceh boleh hancur, tetapi kesadaran geostrategis sebagai bangsa maritim tidak boleh pupus. Oleh sebab itu, kita juga boleh mulai meyakini bahwa Indonesia dan Malaysia itu seladang, bukan serumpun.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Adam Gannaway, 2009. "What is Cosmopolitanism." MPSA Conference Paper
- Angus, Mc. Intyre, , 1973. "The 'Greater Indonesia' Idea of Nationalism in Malaysia and Indonesia.". *Modern Asian Studies* 7 (1): 75–83.
- Braudel, Fernand, 1994. *A History of Civilizations* (terj. Richard Mayne, *Grammaire de Civilisations*). New York: Allen Lane The Penguin Press.
- Cleary, Mark dan Chuan, Goh Kim, 2000. *Environment and Development in The Straits of Malacca*. London: Routledge.
- Hall, Kenneth R., 2011. *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. Plymouth: Rowman & Little Field Publishers.
- Hidayat, Komaruddin dan Widjanarko, Putut, 2008. *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Hobson, John. M., 2004. *Eastern Origins of Western Civilisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jervis, Robert, 1988. "War and Misperception". *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), pp. 675-700.
- Liow, Joseph Chin Yong, 2005. *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*. New York: RoutledgeCurzon.
- Lombard, Denys, 2006. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: KPG.
- Lombard, Denys, 2008. *Nusa Jawa: Silang Budaya II*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Pheng, Cheah, 2006. "Cosmopolitanism." *Theory of Culture Society* (23: 486).
- Ricklefs, M. C., 2001. *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Basingstoke: Palgrave.
- Soedjono, R.P. dan Leirissa, K.Z. (ed), 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 359.
- Susanto, Joko, 2014. "Dari Teritorialisasi Maritim ke Maritimisasi Teritorial: Evolusi Strategi Maritim Indonesia." *Konvensi Nasional ke-V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia*.
- Toer, Pramoedya Ananta, 2002. *Arus Balik*. Jakarta: Hasta Mitra.

Wright, Susan, 1998. "The Politicization of 'Culture'". *Anthropology Today*, Vol. 14, No. 1: 7-15

Online:

Rizka Diputra, 2009. "Agung: Kapal Malaysia Masuk Ambalat, Tembak Saja!", dalam <http://news.okezone.com/read/2009/06/11/1/228220/agung-kapal-malaysia-masuk-ambalat-tembak-saja>. [diakses 26 Agustus 2015].

Mahfud M.D, 2007. "Pelecehan Saudara Serumpun", dalam <http://melayuonline.com/ind/article/read/339/pelecehan-saudara-serumpun>. [diakses 26 Agustus 2015].

Marshall Clark, 2014. "Indonesia and Malaysia's Love-hate Relationship", dalam <http://asiancorrespondent.com/121462/indonesia-and-malaysias-love-hate-relationship/>. [diakses 26 Agustus 2015].

Laporan U.S. Energy Information Administration mengenai World Oil Transit Chokepoints. dalam

http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.pdf,

[diakses tanggal 27 Mei 2014].